BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan hal mendasar dalam sistem akuntabilitas kinerja, melalui perencanaan dan perjanjian kinerja maka target-target terhadap kinerja akan terarah dan terukur. Perencanan dan perjanjin kinerja pada tahun 2019 tidak terlepas dari rencana strategis yang ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui Bab II ini diuraikan komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, diantaranya Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian KInerja serta Rencana Penganggaran. Penjelasan mengeani perencanaan dan perjanjian kinerja ini dilakukan guna menjadi acuan dalam mengupas pengukuran, evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja di BAB selanjutnya.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2018-2023.

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke-empat dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya Pemantapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah pada tahun 2018-2023 harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berkelanjutan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahn 2018 – 2023 adalah :

“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”

Pernyataan visi Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. SEHATI, berarti satu hati atau seia sekata, menunjukkan bahwa seluruh komponen (masyarakat dan *stakeholders* pembangunan) harus bahu membahu mewujudkan kemajuan Kota Cirebon. Mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya pada kata sehat secara harfiah fisik semata, tetapi bermakna pula pada masyarakat yang sehat rohani, jasmani dan sosial.
2. Sehat, adalah suatu kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung. Kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila semua aspek yang meliputi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan, dengan penekanan tidak cukup hanya pada pelayanan kesehatan, tetapi kepada seluruh aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.
3. Hijau. Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan Kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Panorama pemandangan lingkungan yang segar dan hijau akan menciptakan suasana segar, sejuk menawan, menenteramkan hati, mendorong gairah kerja, dan menarik para wisatawan dan usahawan untuk berlibur dan berinvestasi di Kota Cirebon, dan seluruh warga masyarakatnya merasa betah tinggal di kota Cirebon.
4. Agamis, suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Cirebon yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.
5. Inovatif, pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

6. Kota Kreatif, merupakan salah satu strategi dalam perencanaan kota dimana orang-orang dapat berpikir, merencanakan dan bertindak secara kreatif. Kreatifitas diartikan pola pikir *(mental model),* sikap *(character)* dan aksi *(action)* yang merangsang inovasi, komitmen, originalitas dan transformasi untuk membangun diri *(self actualization dan living organization)* secara berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin bermutu, yang bercirikan:
   a. Membangun citra dan identitas lokal;
   b. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
   c. Menciptakan iklim bisnis yang positif;
   d. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan;
   e. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif; dan
   f. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat.

Berbasis Budaya dan Sejarah, diartikan bahwa kreatifitas melekat dengan pengetahuan *(knowledge)* dan kebudayaan *(culture),* sehingga merupakan integrasi antara tradisi dan modernitas yang meliputi 8 (delapan) aspek kehidupan kota yaitu seni dan budaya, sumber daya manusia, lingkungan, industri dan niaga, pariwisata, teknologi, kebijakan pemerintah, serta program pemerintah *(public service).*

Sebagai upaya sinergitas perencanaan pembangunan secara regional, penyusunan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Mengah Kota Cirebon tak terlepas dari pertimbangan perkembangan perencanaan pembangunan di wilayah sekitarnya atau seringkali disebut regional wilayah III yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu serta sebagai acuan yaitu tema pembangunan nasional dan Jawa Barat .

Keterkaitan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon dengan tema pembangunan nasional, Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 2.1
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat,
RPJMD Kota Cirebon dan RPJMD Kabupaten Cirebon

Tema Pembangunan Nasional 2020-2024 :

"Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"

Visi Pembangunan Jawa Barat 2018-2023 :

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Visi Kota Cirebon Kota Cirebon 2018-2023 :

"SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif) Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"

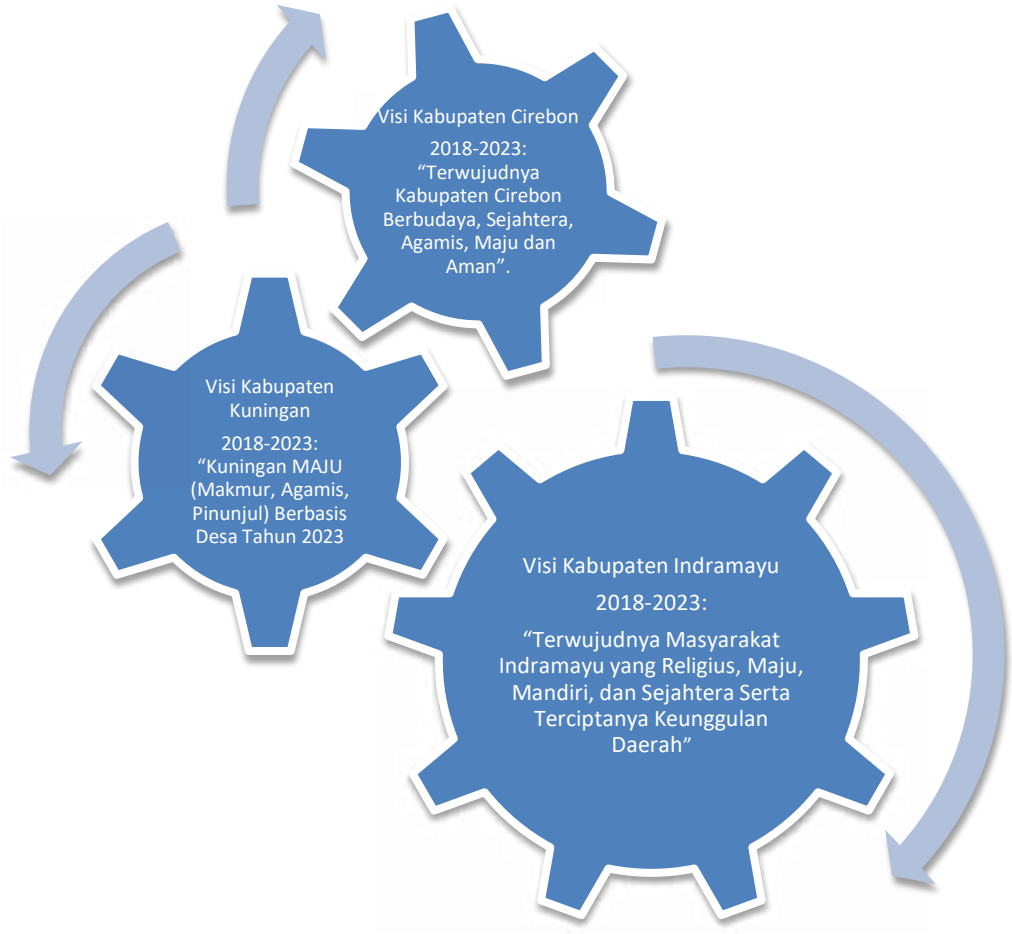

Visi Kota Cirebon *SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif) Kita Wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"* telah selaras dengan Tema Pembangunan Nasional yang termuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu *"Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"*, Visi Provinsi Jawa Barat *"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi",* visi pembangunan Kabupaten Cirebon "*Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman",* dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan *"Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023*", dan dengan visi Kabupaten Indramayu

"Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah". Visi pembangunan tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan mewujudkan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya baik materiil maupun imateril untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, berkarakter, berbudaya, memiliki keunggulan kompetetitif dan berdaya saing tinggi.

Misi Kota Cirebon

Misi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023, telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2018-2023 adalah akselerasi peningkatan sumber daya manusia dan akselerasi peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Perdagangan dan Jasa yang dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 1, yaitu : **"Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang",** sesuai dengan arahan Misi 1, misi 2 dan misi 3 RPJPD yaitu : (1) **"Mewujudkan Masyarakat yang Religius"; (2) "Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat"; dan (3) "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi".** Misi tersebut merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender, yang ditandai dengan :
   a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan dengan IPM minimal 85.
   b. meningkatnya pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai ajaran Agama dengan memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal Cirebon sebagai bagian integral dari budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
   c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukan dengan (1) meningkatnya Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita; (2) Terbangunnya sarana pengolahan air bersih yang layak dan berkelanjutan serta

terpenuhinya sarana sanitasi dasar bagi seluruh masyarakat; dan (3) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit yang dikelola secara profesional dan berorientasi pelanggan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan baik medis maupun administrasi.

d. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan, yang ditunjukan dengan : (1) Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah, menurunnya Angka Putus Sekolah dan menurunnya Angka Buta Huruf; serta (2) Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan dikelola secara profesional untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi.
e. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan umum.
f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.
g. Menurunnya angka kemiskinan.
h. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.
i. Meningkatnya jumlah investor (PMDN dan PMA) yang masuk Kota Cirebon.
j. Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh dengan sektor perdagangan, kelautan dan perikanan menjadi basis utama aktifitas ekonomi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan komoditas berkualitas yang didukung oleh industri pengolahan yang modern serta sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang bermutu.
k. Berkembangnya ekonomi kreatif yang berdaya saing.

2. Misi 2, yaitu : **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif"**, sesuai dengan arahan Misi 6, RPJPD, yaitu **(6) "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa",** yang ditandai dengan :
   a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien.
   b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal.
   c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal.
   d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktifitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing.

   Misi tersebut merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu : **"Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan",** selaras dengan Misi 5 dan 6 RPJPD, yaitu **: (5) "Meningkatkan Kelestarian Lingkungan";** dan **(6) "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa".** Misi ini merupakan arahan dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatian kelestarian lingkungan atau pembangunan berwawasan lingkungan, yang ditunjukan dengan :

a. Mandirinya Kota Cirebon dalam memenuhi pelayanan dasar terutama dalam penyediaan air bersih dan berkelanjutan;
b. Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan berbasis Informasi dan Teknologi untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.
c. Terbangunnya sarana dan prasarana komunikasi yang canggih seperti telepon dan jaringan internet sampai ke pelosok perkotaan.
d. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi darat, yang ditandai dengan terbangunnya jalan yang mampu menerima tekanan gandar besar dan lebar sampai ke pelosok kota.
e. Optimalnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang lebih baik dan berskala internasional.
f. Terencananya pembangunan dengan penguatan dan berpedoman pada aspek tata ruang.
g. Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
h. Terwujudnya ruang terbuka hijau *(bufferzone)* sebagai upaya mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan sumber daya air bersih.
i. Mengoptimalkan potensi pengelolaan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4. Misi 4, yaitu : **"Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif**", selaras dengan Misi 4 RPJPD, yaitu : **"Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan",** yang ditandai dengan :
   a. Menciptakan situasi politik yang kondusif melalui terselenggaranya iklim politik yang sehat.
   b. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
   c. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Cirebon yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

   Meningkatnya investasi untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan

Gambar 2.2
Keterkaitan Misi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dengan
Misi RPJMD Kota Cirebon 2018-2023

Visi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025: Misi RPJPD 2005-2025:	Sesuai dengan	Visi RPJMD Kota Cirebon 2018-2023: Misi RPJMD 2018-2023:
1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius		1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi		3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan		4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan		
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa		

Sumber : Dokumen RPJMD 2018-2023

2.1.2 Tujuan dan Sasaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon secara

teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Cirebon, kebijakan pembangunan jangka menengah Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya tujuan tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2023.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cirebon merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Cirebon Tahun 2005-2025, sehingga tercipta kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Rumusan tujuan dan sasaran, dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1

Tabel keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1	*2*	*3*		*4*
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang				
1.1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.			a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon
				b. Indeks Gini
				c. Pendapatan Per Kapita (000.000)
				d. Indeks Daya Beli
		1.1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	• Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
				• Harapan Lama Sekolah (HLS)
		1.1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (Permil)
		1.1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	• Angka Usia Harapan Hidup Kota Cirebon (tahun)
				• Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
		1.1.4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
		1.1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (Persen)
				• Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Persen)
				• Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (%)
		1.1.6	**Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda**	• Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional
				• Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (Persen)
		1.1.7	**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)
				Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Poin)
		1.1.8	**Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon**	• Peningkatan PDRB dari sektor industri (Persen)
				• Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan (Persen)
		1.1.9	**Berkurangnya penduduk miskin**	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
		1.1.10	**Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan**	Skor Pola Pangan Harapan/PPH (Skor)
				Peningkatan PDRB dari sektor pertanian (%)
		1.1.11	**Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan**	Peningkatan PDRB dari sektor Pariwisata (%)

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1	*2*	*3*		*4*
			Ekonomi Inklusif	
		1.1.12	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama (Kasus)
		1.1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)
		1.1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	Tingkat perkembangan kelurahan:
				Kota Cirebon:
				• Kurang Berkembang
				• Berkembang
				• Cepat Berkembang
				Tingkat Kualifikasi Status Kelurahan :
				Kec. Kesambi :
				• Swakarya Mula
				• Swakarya Madya
				• Swakarya Lanjut
				• Swasembada Mula
				• Swasembada Madya
				• Swasembada Lanjut
				Kec. Pekalipan:
				• Swakarya Mula
				• Swakarya Madya
				• Swakarya Lanjut
				• Swasembada Mula
				• Swasembada Madya
				• Swasembada Lanjut
				Kec. Kejaksan:
				• Swakarya Mula
				• Swakarya Madya
				• Swakarya Lanjut
				• Swasembada Mula
				• Swasembada Madya
				• Swasembada Lanjut
				Kec. Harjamukti:
				• Swakarya Mula
				• Swakarya Madya
				• Swakarya Lanjut
				• Swasembada Mula
				• Swasembada Madya
				• Swasembada Lanjut
				Kec. Lemahwungkuk
				• Swakarya Madya
				• Swakarya Lanjut
				• Swasembada Mula
				• Swasembada Madya

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1	2	3		4
				• Swasembada Lanjut
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif				
2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan.			Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)
		2.1.1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	• Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi (%)
				• Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target (%)
				• Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin (%)
				• Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN (%)
		2.1.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan (Persen)
				Persentase Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Pemerintahan yang Diterapkan
		2.1.3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai AKIP
		2.1.4	Meningkatnya maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP
		2.1.5	Meningkatnya pelayanan publik	• Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan perijinan (%)
				• Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan
		2.1.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	• Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah
				• Rasio PAD terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah
		2.1.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip daerah	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota (Poin)
		2.1.8	Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD	Rasio Jumlah Perda yang ditetapkan terhadap Raperda (%)
				Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran
				Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan
		2.1.9	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan	• Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1	*2*	*3*		*4*
			terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*	• Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi
		2.1.10	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	• Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (Persen)
				• Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD (%)
		2.1.11	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti untuk menjadi bahan Kebijakan Daerah (%)
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan				
3.1	Menyediakan pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/ GRK (Persen)
		3.1.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Tingkat pelayanan ruas jalan
\		3.1.2	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase	Persentase drainase kondisi baik
		3.1.3	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk (Persen)
		3.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH (Poin)
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif				
4.1	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1	*2*	*3*		*4*
	Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan			
		4.1.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	• Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Lokasi/titik)
				• Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat kecamatan (Nilai indeks rata-rata keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan)
				✓ Kecamatan Kejaksan (Poin)
				✓ Kecamatan Lemahwungkuk (Poin)
				✓ Kecamatan Harjamukti (Poin)
				✓Kecamatan Pekalipan (Poin)
				✓Kecamatan Kesambi (Poin)
		4.1.2	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional	Konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme (Kasus)
		4.1.3	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK (Persen)
				Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana

2.2. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat pada saat Kampanye Pemilukada merupakan hal-hal strategis yang perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, dilaksanakan melalui: (1) Pembangunan gedung sekolah/Unit Sekolah Baru SD dan SMP di

Argasunya; (2) Relokasi bangunan sekolah SD/SMP; (3) Peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap; (4) Relokasi Puskesmas Jalan Kembang; (5) Relokasi Puskesmas Pekalangan; (6) Relokasi Puskesmas Astanagarib; (7) Puskesmas DTP Pamitran; (8) Kartu Cirebon Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI); (9) Kartu Cirebon Cerdas bagi Siswa Keluarga Miskin; (10) Pengembangan literasi; (11) Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari; (12) Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

2. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan upaya realisasi pembangunan CORR; (2) Pembangunan jalan dan jembatan; (3) Penataan trotoar jalan; (4) Penataan saluran drainase; (5) Penataan Kawasan kumuh; (6) Pembangunan/penyediaan Rumah Susun; (7) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni; (8) Kontinuitas layanan air bersih; (9) Pembangunan sumur artesis; (10) Penyediaan rumah singgah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; (11) Pengembangan infrastruktur transportasi; (12) Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan dan peningkatan upaya pengurangan sampah di sumbernya; (13) Pemenuhan kebutuhan dan penataan lahan untuk RTH publik; (14) Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah domestik; (15) Pembangunan jalur Kereta Api *Elevated Railway*, dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat; (16) Pembangunan dan penataan PJU; (17) Pembangunan dan penataan taman; (18) Penataan Kawasan Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan dan Jalan Pasuketan;
3. Peningkatan produktivitas daya saing daerah, dilaksanakan melalui: (1) Pembentukan wirausaha baru; (2) Peningkatan daya saing ekonomi kreatif; (3) Pembangunan/penataan gedung kreatif; (4) Penataan alun-alun kejaksan; (5) Pemberdayaan ekonomi kaum perempuan; (6) Pembangunan/penyiapan centra/cluster pengembangan industri kreatif
4. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata.

   Prioritas pembangunan ke-empat dilaksanakan melalui: (1) Revitalisasi dan penataan Kawasan Kota Tua; (2) Pemanfaatan Kawasan ex galian C menjadi lokasi wisata; (3) Penataan trotoar (pembangunan *main street* dan *shoping street)*; (4) Penatan Kawasan Bima; (5) Pembangunan *Sky Walk* Kawasan Sukalila; (6) Penataan pantai Kesenden; (7) Penataan Keraton dan Bangunan Cagar Budaya; (8) Penataan Kampung Benda menjadi lokasi wisata religi; dan (9) Pengembangan wisata halal.

5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan melalui: (1) pembangunan *Command Centre*; (2) Penerapan *Smart City* dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik; (3) Pembentukan Warung Konsultasi bagi aparatur; (4) Pembangunan/rehabilitasi Gedung DPRD; (5) Integrasi Perencanaan, penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan
   Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui :
   (1) peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   (2) pengurangan titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu perlu dirumuskan tema/fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan maka perlu disusun arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan

memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan. Berikut adalah arah kebijakan dimaksud :

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023

VISI : SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang				
1.1	Menciptakan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih, dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	▪ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.
				▪ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				▪ Meningkatkan kompetensi, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
		2. Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	▪ Meningkatkan layanan perpustakaan dalam

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				upaya meningkatkan minat baca masyarakat
				▪ Meningkatkan minat baca di masyarakat melalui penyelenggaraan even literasi, pojok baca, taman bacaan, dan gerobak baca di masyarakat.
		3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan dan peran serta masyarakat terhadap upaya kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
		4. Terkendalinya jumlah penduduk	Pengendalian fertilitas dan mortalitas dan migrasi	▪ Menyediakan *Grand Design* Pengendalian Penduduk dalam penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan
				▪ Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk
		5. Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas, produktivitas tenaga kerja, lembaga ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan peluang usaha	Meningkatkan kompetensi, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
		6. Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda	Peningkatan pembinaan kepemudaaan dan prestasi olahraga	Meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan dan kualitas olahraga
		7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan	▪ Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	▪ Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		perlindungan anak		perlindungan anak
			▪ Memperkuat peran keluarga dan kesetaraan gender	▪ Meningkatkan ketahanan keluarga serta peranannya dalam perlindungan perempuan dan anak
		8. Meningkatkan peran industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon.	▪ Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah fokus pada dukungan industri kreatif	▪ Membangun klaster industri kreatif, kemitraan dan pemanfaatan teknologi.
			▪ Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	▪ Meningkatkan sistem dan jaringan informasi harga serta ketersediaan stok barang kebutuhan masyarakat dan barang penting lainnya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi peningkatan perdagangan luar negeri (ekspor), pembinaan pengembangan pasar rakyat dan perlindungan konsumen.
			▪ Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	▪ Meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kapasitas produk UMKM, fasilitasi akses dan bantuan modal usaha (pembiayaan, sarana dan prasarana) dan membuka peluang dan akses pemasaran.
		9. Berkurangnya penduduk miskin.	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu	▪ Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				miskin.
				▪ Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
				▪ Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
		10. Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan.	Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
				Meningkatkan produktifitas pertanian, kelautan dan perikanan.
		11. Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatkan potensi daya tarik dan promosi pariwisata.	▪ Mengembangkan destinasi wisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif.
				▪ Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital.
		12. Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	▪ Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
				▪ Meningkatkan peran tokoh agama dalam memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan.
				▪ Peningkatan implementasi pelaksanaan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti dzikir akbar, Cirebon Bershalawat.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		13. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local	▪ Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Cirebon	▪ Meningkatkan pelestarian dan legalitas seni dan budaya lokal
			▪ Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan lokal	▪ Perlindungan, pengembangan dan penataan cagar budaya
		14. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan	Memperkuat pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.				
2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam manajemen Pemerintahan.	1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta penerapan *reward and punishment*.	Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
		2. Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan melalui peningkatan koordinasi dan kapabilitas Sekretariat Daerah	▪ Meningkatkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan
				▪ Optimalisasi pengelolaan kebijakan penyelenggaraan urusan melalui peningkatan peran Asisten Daerah dan Bagian di Sekretariat Daerah
		3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	▪ Merumuskan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	▪ Melakukan evaluasi terhadap kebijakan SAKIP yang telah ada
			▪ Meningkatkan kualitas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota	▪ Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah
			▪ Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	▪ Melakukan review SAKIP Perangkat Daerah
		4. Meningkatnya	Meningkatkan pembinaan dan	Meningkatkan kualitas

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		maturitas SPIP	pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan	pengawasan pemerintahan dan pembangunan yang terpadu dan transparan
		5. Meningkatnya pelayanan public	▪ Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan perijinan	▪ Meningkatkan pertumbuhan investasi
			▪ Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan	▪ Meningkatkan kualitas layanan kependudukan pencatatan sipil.
		6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	▪ Tergalinya Potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal	▪ Meningkatkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
			▪ Meningkatnya tatakelola keuangan dan asset daerah	▪ Meningkatkan keselarasan program dan kegiatan dalam APBD dengan RKPD
				▪ Penyusunan APBD tepat waktu
		7. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah	Meningkatkan tatakelola kearsipan Perangkat Daerah	▪ Menyiapkan kebijakan dan Peraturan Kepala Daerah terkait tatakelola kearsipan.
				▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.
		8. Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD	Meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Optimalisasi peran DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
		9. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, handal dan terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	▪ Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis *e-government*.
				▪ Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel berbasis TIK.
		10. Meningkatnya	▪ Melakukan updating data	▪ Optimalisasi data

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kualitas perencanaan pembangunan daerah	SIPD	yang *up to date* dari semua sektor dan Perangkat Daerah
			▪ Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan Perangkat daerah	▪ Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah
			▪ Peningkatann kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	▪ Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
		11. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.	Peningkatan pemahaman atas penelitian, pengkajian dan pengembangan serta peningkatan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan.	Meningkakan kapasitas aparatur terhadap penelitian, pengkajian dan pengembangan serta merintis kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi.
Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan				
3.1	Menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.	1. Meningkatnya pelayanan kapasitas jalan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan secara merata di seluruh wilayah.	Meningkatkan kemantapan kondisi jalan interkonektivitas pertumbuhan ekonomi
		2. Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase	Meningkatkan kapasitas jaringan drainase	Penataan jaringan drainase secara merata di seluruh ruas jalan dan lingkungan permukiman.
		3. Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	▪ Meningkatkan kemantapan dan keselamatan transportasi
				▪ Membangun dan mengembangkan prasarana angkutan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				darat yang menghubungkan wilayah potensial yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
			Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang handal dan modern	▪ Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan yang aman, nyaman dan terjangkau.
				▪ Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda.
		4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	▪ Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.	▪ Meningkatkan kualitas dan penyediaan air, serta kualitas udara.
				▪ Meningkatkan tutupan vegetasi
				▪ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
			▪ Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	▪ Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
			▪ Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum
				▪ Penyediaan rumah layak huni
				▪ Rehabilitasi rumah tidak layak huni
				▪ Pengurangan kawasan kumuh kota.
Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.				
4.1	Menciptakan perlindungan bagi	1. Meningkatnya kondusifitas	Meningkatkan upaya-upaya penegakan peraturan daerah,	▪ Peningkatan upaya penanganan daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	masyarakat, mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.	ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penertiban dan perlindungan masyarakat	rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
				▪ Penegakan Peraturan Daerah melalui pembentukan kawasan-kawasan ketertiban khusus.
				▪ Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
		2. Meningkatnya rasa nasionalisme dan kewaspadaan nasional	▪ Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan	▪ Meningkatkan ideologi wawasan kebangsaan
			▪ Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	▪ Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.
		3. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Mengurangi resiko bencana	▪ Meningkatkan mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana
				▪ Menyusun Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan 11 sasaran strategis yang mencakup 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja UTama
1.	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	1.1	Pendapatan per Kapita (Rp.000.000)
		1.2	Indeks Daya Beli
2.	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	2.1	Rata –rata lama Sekolah
		2.2	Harapan lama sekolah
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	3.1	Angka Usia Harapan Hidup
		3.2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
4.	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	4.1	Indeks Pembangunan Gender /IPG
		4.2	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG

5.	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	5.1	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan
6.	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	6.1	Skor Pola Pangan Harapan /PPH
7.	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	7.1	Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata
8.	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	8.1	Konflik Antar Umat Beragama
9.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi
10.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	10.1	Opini BPK atas laporan keuangan daerah
11.	Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH
		11.2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
12.	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	12.1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, melalui target-target yang diperjanjikan maka akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan pada tahun tersebut. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, sehingga kinerja yang diperjanjikan pada tahun tersebut bias dijadikan prioritas untuk mendapatkan pembiayaan dan menjadi fokus prioritas dalam pencapaian kinerja.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana te;ah ditetapkan pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023 sebagai acuan dalam menetapkan sasaran pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020. Dengan memastikan seluruh indikator kinerja utama menjadi indikator yang diperjanjikan maka Pemerintah Daerah KOta Cirebon berupaya menjamim program prioritas dapat dilaksanakan guna mendukung indikator kinerja tersebut.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 , dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi ke-1 "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul dalam Segala Bidang"			
1.1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Pendapatan per Kapita (Rp.000.000)	76,41
		Indeks Daya Beli	73,32
1.2	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah	10,22
		Harapan lama sekolah	13,57
1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup	72,25
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	99,02
1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender /IPG	94,28
		Indeks Pemberdayaan Gender /IDG	76,26
1.5	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon.	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	31,98
1.6	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	80,90
1.7	Meningkatnya peran pariwisata sebagai	Meningkatnya PDRB	5,63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	dari Sektor Pariwisata	
1.8	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama	0
Misi Ke-2 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa, dan Inovatif”			
2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP
Misi ke-3 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan”			
3.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	45,50
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3,92
Misi Ke-4 “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”			
4.1	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	70

2.5. Rencana Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun 2020 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Belanja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020

NO	Uraian	Rencana	%
1	Belanja Tidak Langsung	720.027.135.577,00	43%
2	Belanja Langsung	969.318.431.393,00	57%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, diolah

Sementara itu berikut adalah rencana penganggaran tahun 2020 berdasarkan program-program yang mendukung pencapaian sasaran pada Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja serta seluruh sasaran strategis di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023, rencana anggaran tersebut merupakan komponen dari belanja Langsung yang berbentuk program/kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis serta program/kegiatan yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis, pada umumnya program yang tidak mendukung sasaran langsung tersebut merupakan program kegiatan pendukung yang berada pada wilayah kesekretariatan. Rekapitulasi jumlah anggaran program,/kegiatan tersebut kami akan uraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Rencana Anggaran (Telah Refocusing Anggaran terkait Penanganan Pandemi)
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	
1.1.1	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	50.819.025.579,00
1.1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	506.790.000,00
1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	582.569.987.521,00
1.1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	3.313.160.250,00
1.1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	517.160.800,00
1.1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	1.236.655.000,00
1.1.7	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	292.044.500,00
1.1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	978.595.000,00
1.1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	2.356.287.000,00
1.1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	4.366.389.600,00
1.1.11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	289.800.000,00
1.1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	5.000.000,00
1.1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	979.815.000,00
1.1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	29.228.799.750,00

No	Tujuan/Sasaran	Rencana Anggaran (Telah Refocusing Anggaran terkait Penanganan Pandemi)
2.	MISI 2	
2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	
2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	1.367.240.400,00
2.1.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah	6.457.965.561,00
2.1.3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	121.555.600,00
2.1.4	Meningkatnya Maturitas SPIP	131.801.000,00
2.1.5	Meningkatnya Pelayanan Publik	2.109.340.400,00
2.1.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	6.731.712.169,00
2.1.7	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	373.508.000,00
2.1.8	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	5.403.483.000,00
2.1.9	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City	6.064.114.900,00
2.10	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.265.726.000,00
2.11	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	134.710.000,00
3	Misi 3	
3.1	Menyediakan pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan	

No	Tujuan/Sasaran	Rencana Anggaran (Telah Refocusing Anggaran terkait Penanganan Pandemi)
	sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.	
3.1.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	1.787.607.000,00
3.2	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.	15.417.241.736,00
3.3	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	989.408.000,00
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	58.685.537.927,00
4.	MISI 4	
4.1	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	
4.1.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	3.750.347.000,00
4.1.2	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional	1.470.662.500,00
4.1.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	5.803.267.800,00
Total Anggaran Program yang mendukung secara langsung		801.588.853.893,00
5	Program-program yang mendukung sasaran secara tidak langsung yaitu program penunjang penyelenggaraan urusan sebagai penunjang sasaran (Program yang berada pada wilayah kesekretariatan)	167.729.577.500,00
Total Anggaran		969.318.431.393,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah (diolah)